

Laporan Penyampaian Hasil Kajian Pengelolaan Rumpon



Kegiatan Terlaksana Atas Kolaborasi KKP – MDPI - YII



Februari 2026

1. Pendahuluan

Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas hasil kajian tentang pengelolaan rumpon dalam upaya optimalisasi pengelolaan rumpon di Indonesia. Aturan mengenai rumpon telah ditetapkan sebagai bagian dari tindakan pengelolaan dalam *Harvest Strategy* (HS) yang disetujui para pemangku kepentingan, dan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022, namun implementasinya di lapangan masih berjalan lambat. Melalui paparan hasil kajian mengenai pengelolaan rumpon di lapangan dan dampak fisiologis rumpon terhadap tuna, pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan usulan, terobosan, dan langkah tindak lanjut yang konkret guna mempercepat pelaksanaan regulasi tersebut di masa depan.

2. Tujuan

1. Menyampaikan hasil kajian ilmiah terkait rumpon
2. Memberikan rekomendasi terhadap upaya pengelolaan rumpon agar bisa diterapkan di lapangan.

3. Jenis Kegiatan

Penyampaian hasil kajian pengelolaan rumpon dan dampak rumpon terhadap fisiologis ikan tuna sebagai masukan dalam mendukung perbaikan kebijakan tata kelola rumpon di Indonesia.

4. Waktu dan tempat pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Rabu, 11 Februari 2026 pukul 13.00 – 17.00 WIB di Ashley Hotel, Jl. K.H. Wahid Hasyim No.73-75, Jakarta Pusat.

5. Metode pelaksanaan

Rapat Penyampaian Hasil Kajian Pengelolaan Rumpon dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring), yang dibuka secara resmi oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI). Agenda utama diisi dengan pemaparan materi oleh akademisi IPB University (Institut Pertanian Bogor), Dr. Muhammad Solihin, S.Pi., M.H., mengenai 'Telaah Ilmiah Pengelolaan Rumpon di Indonesia'. Selanjutnya, pakar dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. dan Ignatius Tri Hargiyatno, M.Si., Ph.D., memaparkan materi terkait 'Dampak Rumpon terhadap Kondisi Fisiologis Tuna'. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab interaktif. Sebagai penutup, seluruh peserta merumuskan poin-poin rekomendasi berbasis hasil paparan dan diskusi, yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam revisi peraturan tentang pengelolaan rumpon.

Rincian urutan kegiatan tercantum secara lengkap pada lampiran.

6. Peserta dan Narasumber

Rapat dihadiri oleh 44 peserta (29 laki-laki dan 15 perempuan) yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi, antara lain:

- Pemerintah: Perwakilan DJPRL (Direktorat Jendral Penataan Ruang Laut), dan unit kerja lingkup DJPT (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap).
- Lembaga Riset: BRIN.
- Akademisi: Universitas IPB.
- Mitra/ Asosiasi: MDPI, YII, YKAN, Konsorsium Tuna, dan AP2HI.

Rincian jumlah dan nama peserta tercantum secara lengkap pada lampiran.

7. Hasil Pemaparan Materi

- Telaah Ilmiah Pengelolaan Rumpon di Indonesia oleh Dr. Muhammad Solihin, S.Pi., M.H.

Implementasi kebijakan rumpon saat ini menghadapi tantangan besar berupa kerumitan prosedur OSS (*Online Single Submission*) bagi nelayan kecil—terutama terkait persyaratan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang sulit dipenuhi, serta minimnya literasi teknis pelaku usaha yang memicu ledakan jumlah rumpon tak terkendali, konflik ruang, dan sikap apatis pemerintah daerah akibat tumpang tindih kewenangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis melalui afirmasi perizinan kolektif dan penyederhanaan syarat PKKPR bagi nelayan kecil, penyesuaian jarak antar-rumpon di bawah 10 mil laut, serta pengalihan fokus dari penindakan hukum ke arah pembinaan. Selain itu, integrasi SIPR (Surat Izin Penempatan Rumpon) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) menjadi satu paket perizinan, penguatan pemeriksaan SIPR sebagai syarat SLO (Surat Laik Operasi), digitalisasi pemantauan berbasis GIS, penguatan koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi data, serta penerapan zona bebas rumpon bagi API (Alat Penangkapan Ikan) non-rumpon menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola rumpon yang lebih adil dan berkelanjutan.

- Dampak Rumpon terhadap Kondisi *Physiological* Tuna oleh Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc., dan Ignatius Tri Hargiyatno, M.Si., Ph.D. cand,

Meskipun 90% perikanan tuna di Indonesia sangat bergantung pada rumpon, kekhawatiran mengenai dampak "perangkap ekologis" yang dapat memperburuk kesehatan tuna ternyata tidak terbukti secara fatal, sebagaimana ditunjukkan oleh eksperimen fisiologi yang mengonfirmasi bahwa mayoritas tuna di alam rumpon masih berada pada fase cadangan energi yang aman dan mampu pulih dengan cepat. Berdasarkan temuan bahwa tuna cenderung meninggalkan rumpon sebelum mencapai

kondisi kritis. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang rencana pelarangan rumpon mengingat ketergantungan ekonomi nelayan yang sangat tinggi. Sebagai langkah strategis, pengelolaan harus difokuskan pada pendataan jumlah dan posisi rumpon yang lebih akurat, penggunaan indikator morfometrik seperti *Hepatosomatic Index* (HSI) untuk memantau kesehatan stok secara berkelanjutan.

Paparan narasumber tercantum secara lengkap pada lampiran.

8. Rekomendasi berdasarkan paparan dan diskusi.

Semua peserta yang hadir bersepakat untuk memberikan rumusan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan perizinan rumpon terutama persyaratan PKKPR dan peniadaannya bagi nelayan kecil dan perpendekan jarak rumpon < 10 mil laut.
2. Peningkatan pengawasan perizinan rumpon melalui sistem informasi data rumpon berbasis GIS, pengutamaan pendampingan dan pembinaan dibandingkan pengekan hukum, penyatuan SIPI dan SIPR, Penerbitan SLO dengan syarat pemeriksaan SIPR atau PKKPR, pelibatan pokmaswas dalam pemantauan rumpon.
3. Koordinasi kelembagaan di daerah untuk sinkronisasi data dan menghindari overlap kewenangan Pemerintah pusat dan daerah.
4. Sistem integrasi rumpon dengan RTRW (rencana tata ruang wilayah), kawasan koservasi, PIT (penangkapan ikan terukur), RPP TCT (rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang dan tongkol) dan dokumen SIPI
5. Adanya zona bebas rumpon untuk API yang tidak memerlukan rumpon.

Rekomendasi pengelolaan rumpon tercantum secara lengkap pada lampiran.

9. Penutup

Demikian Demikian laporan ini disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran

Dokumentasi kegiatan

<https://drive.google.com/drive/folders/1gDtWcnteulN3q8eWR7iTumMyoXJ5luPM>

Agenda dan undangan kegiatan

https://drive.google.com/file/d/12OgL8sSucr2zENxjy_IAv8c9uO9MHiGZ/view?usp=drive_link

Daftar Hadir Peserta Kegiatan

https://drive.google.com/drive/folders/1X_-nGJOIPIAytQjRqh94JeSUMj_QdAzT

Paparan narasumber

https://drive.google.com/drive/folders/1Z0_nbWp5thqF45iTAWy-YEtGp3mBWu16

Draft rekomendasi hasil kegiatan

https://docs.google.com/document/d/1r390E8KjFAKJsAuR7LmGUiQQX8ys8_a/edit?usp=drive_link&oid=116009356709323492449&rtpof=true&sd=true